

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan global yang diakui sebagai hak asasi manusia serta aset penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki tanggung jawab fundamental dalam menjamin derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Dalam konteks penanggulangan penyakit, secara universal, penanganan kesehatan menghadapi tantangan kompleks yang tidak hanya bergantung pada intervensi medis, tetapi juga pada faktor sosiokultural seperti perilaku dan stigma (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2024). Oleh karena itu, strategi komunikasi yang berfokus pada perubahan perilaku menjadi elemen kunci dalam mendukung efektivitas kebijakan kesehatan. Salah satu ancaman kesehatan masyarakat yang masih memerlukan penanganan multidimensi dan berkesinambungan di Indonesia adalah infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dengan menargetkan sel darah putih (sel CD4) yang berfungsi melawan infeksi. Apabila tidak segera diobati, HIV dapat berkembang menjadi *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS), yaitu tahap akhir dari infeksi HIV di mana sistem kekebalan tubuh tidak lagi mampu melawan berbagai penyakit (World Health Organization [WHO], 2025). Berdasarkan data epidemiologi terbaru yang diterbitkan oleh Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS, 2025), yang merupakan sumber utama data statistik global, HIV masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang utama dan telah merenggut sekitar 40,4 juta jiwa hingga saat ini. Pada akhir tahun 2024, diperkirakan terdapat 39 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan HIV,

dengan sekitar 1,3 juta kasus infeksi baru dan 630 ribu kematian akibat HIV pada tahun 2024. Dari semua orang yang hidup dengan HIV, 87% mengetahui status mereka, dan sekitar 65% dari total kasus HIV berada di wilayah Afrika (UNAIDS, 2025, hlm. 5). WHO (2025) juga menegaskan bahwa hingga kini belum ditemukan obat untuk infeksi HIV. Namun, dengan akses terhadap pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan perawatan yang efektif, HIV telah menjadi kondisi kesehatan kronis yang dapat dikelola sehingga memungkinkan orang dengan HIV untuk hidup panjang dan sehat. Kondisi global ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV, sehingga penguatan strategi komunikasi menjadi sangat penting.

Di Indonesia, HIV tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Secara nasional, jumlah kumulatif kasus HIV telah mencapai lebih dari 526.841 kasus hingga akhir tahun 2023, dengan peningkatan signifikan pada tahun tersebut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2024, hlm. 177-179). Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perilaku berisiko (hubungan seksual tidak aman, penggunaan NAPZA suntik), serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tes HIV. Penularan virus HIV terutama terjadi melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan pra-ejakulasi, cairan rektal, dan ASI. Penting untuk ditegaskan bahwa HIV tidak menular melalui kontak fisik biasa seperti sentuhan, udara, atau air, pemahaman yang keliru mengenai cara penularan ini sering kali menjadi akar dari munculnya stigma dan diskriminasi di masyarakat. Untuk menekan penularan HIV, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menjalankan beberapa program strategis, termasuk Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) serta layanan tes dan konseling HIV. Pemerintah juga memperkuat strategi komunikasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HIV, mendorong tes sukarela, dan mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], t.t.). Upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024, yang menekankan pentingnya pengendalian penyakit menular melalui peningkatan promosi kesehatan, komunikasi risiko, dan kolaborasi lintas sektor (Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia [Kemenkes RI], 2023). Meskipun berbagai program telah dijalankan, efektivitas strategi komunikasi masih menghadapi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan komunikasi dan edukasi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait HIV dapat berubah. Selain itu, penularan HIV di Indonesia banyak ditemukan pada kelompok dengan perilaku berisiko, seperti laki-laki seks dengan laki-laki (LSL), gay, biseksual, transgender, pekerja seks, serta penggunaan narkoba suntik. Kasus HIV juga mulai meningkat pada perempuan dan kelompok usia muda akibat rendahnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV. HIV yang tidak ditanganidengan baik dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga penderita rentan mengalami infeksi oportunistik, seperti infeksi jamur pada otak dan penyakit lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan HIV tidak hanya memerlukan pendekatan medis, tetapi juga strategi komunikasi kesehatan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan HIV. Kondisi nasional ini kemudian menjadi konteks bagi upaya pencegahan dan strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2024).

Konteks nasional yang memerlukan penguatan komunikasi dan pencegahan tersebut sangat relevan terjadi di tingkat regional, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data resmi dari Dinas Kesehatan Jawa Timur per akhir 2023, estimasi total orang dengan HIV (ODHIV) di Jawa Timur mencapai 65.238 orang (Kominfo Jatim, 2023). Selain itu, penemuan kasus baru sepanjang tahun tersebut mencapai 9.409 kasus (Antara, 2023), menunjukkan kecepatan penambahan kasus yang tinggi. Tren ini segera terefleksi di tingkat daerah, di mana Kabupaten Jember menunjukkan beban yang signifikan. Pada tahun 2023 tercatat 911 kasus baru di Jember (Prosalina Radio, 2024). Penambahan kasus terus berlanjut, dengan sekitar 600 hingga 670 kasus baru ditemukan sepanjang tahun 2024 (Kompas.com, 2024). Akibat akumulasi kasus ini, Jember kini menempati peringkat kedua tertinggi di Jawa Timur berdasarkan data BPS tahun 2024 yang dirilis awal 2025, dengan penemuan 229 kasus baru (RRI, 2025). Data kumulatif Jember yang mencapai sekitar 8.000 pasien sejak tahun 2002 ini dinilai oleh Kepala Bidang P2P Dinas

Kesehatan Jember, Dr. Rita Wahyuningsih, masih bersifat "fenomena gunung es", karena hanya sekitar 2.300 pasien yang aktif berobat, dr. Rita juga menegaskan bahwa tantangan utama adalah tingginya tingkat diskriminasi terhadap ODHA di masyarakat, yang membuat pasien enggan melanjutkan pengobatan dan memilih pindah (RRI Jember, 2024). Kondisi ini secara tegas mengindikasikan bahwa efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember masih belum optimal dalam mengatasi hambatan sosiokultural dan menjangkau kelompok sasaran secara masif.

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kesehatan sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dalam menekan laju penularan HIV/AIDS. Upaya tersebut meliputi sosialisasi dan penyuluhan di sekolah, perguruan tinggi, serta kelompok masyarakat berisiko tinggi seperti pekerja seks dan penggunaan narkoba suntik (Prosalina Radio, 2024). Dinas Kesehatan juga menyediakan layanan VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) di sejumlah puskesmas dan rumah sakit, serta menjalin kerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi komunitas dalam program pendampingan bagi ODHA (Kominfo Jatim, 2023: Antara, 2023). Selain itu, Dinkes Jember aktif melakukan kampanye melalui media sosial dan siaran radio lokal untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan HIV (RRI Jember, 2024). Namun demikian, berbagai upaya tersebut belum mampu menekan angka kasus baru yang terus meningkat setiap tahunnya (Kompas.com, 2024: RRI, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, baik dalam hal penyusunan pesan, pemilihan media, maupun jangkauan sasaran.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penularan HIV di Kabupaten Jember masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan medis, tetapi juga melalui strategi komunikasi yang efektif dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan penularan HIV. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan

strategi komunikasi yang ada, sehingga dapat menjadi dasar merumuskan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan tepat sasaran di masa mendatang. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian strategi komunikasi kesehatan, serta manfaat praktis sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam memperkuat efektivitas program pencegahan HIV di masa mendatang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan penularan HIV?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi komunikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan penularan HIV?
3. Bagaimana evaluasi strategi komunikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan penularan HIV?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan perencanaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan penularan HIV.
2. Menganalisis pelaksanaan strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan penularan HIV.
3. Mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam upaya mencegah penularan HIV.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:
 1. Menambahkan Khazanah keilmuan dalam kajian Strategi Komunikasi Organisasi, terutama yang diterapkan oleh institusi pemerintah di tingkat daerah.
 2. Memberikan pemahaman empiris mengenai efektivitas Strategi Perubahan Perilaku melalui komunikasi dalam upaya menekan masalah sosiokultural seperti stigma dan diskriminasi.
2. Manfaat Praktis:
 1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi yang konkret dalam rangka meningkatkan efektivitas perumusan, implementasi dan penilaian program komunikasi kesehatan untuk pencegahan penularan HIV di Kabupaten Jember.
 2. Bagi Pengembangan Keilmuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau dasar bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji strategi komunikasi.